



Judul : Pamor MK Dipertaruhkan DPR
Tanggal : Senin, 02 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

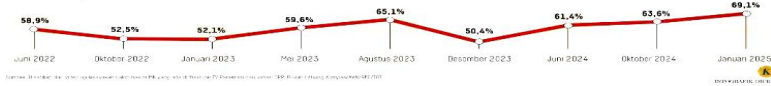
Pamor MK Dipertaruhkan DPR

Pengantian calon hakim konstitusi oleh DPR dalam waktu singkat menimbulkan pertanyaan publik. Proses politik ini menjadi perhatian bagi pamor Mahkamah Konstitusi ke depan.

Uji Kelayakan Sejumlah Calon Hakim MK

Tanggal	Mahasiswa	Uji	Waktu
08 Februari 2019	Adama	Uji Tulis	50 menit
06 September 2023	Sani	Uji Tulis	1 jam 45 menit
21 Agustus 2025	Samudra	Uji Tulis	1 jam 30 menit
05 Januari 2026	Adies	Uji Tulis	25 menit

Tren Citra Positif Mahkamah Konstitusi



Sumber: Indikator Politik Indonesia dan Indikator Politik Indonesia. *Berdasarkan data survei Indikator Politik Indonesia.

Pengantian calon hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR pada 27 Januari 2025 relatif cepat, even dengan disorot. Pengantian calon ini hanya beberapa hari saja hingga mengakhiri pencarian calon yang terpilih sebelumnya. Langkah DPR hak ulung waktu karena ada sejumlah tabung alternatifitas pemilihan calon hakim konstitusi yang tidak diabaikan.

Sebelumnya, ada rentang waktu enam bulan pasca-pengantian Inonisatus Samudra sebagai hakim konstitusi terpilih menggantikan Anief Hidayat di Rapat Paripurna DPR pada 21 Agustus 2025. Namun, pekan lalu tiba-tiba muncul nama politisi Partai Golkar, Adies Kadir, yang kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR yang selanjutnya membatalkan keputusan Inonisatus.

Tak pelak, proses pengantian ini melibatkan ketegangan masyarakat dan halangan pemerintah. Di mata publik awam, mungkin sulit untuk menilai motivasi di balik pengantian tersebut. Namun, pengantian ini wajar jika mengungkap proses pengantian yang begitu cepat dan uji kelayakan dan keputusan (*one-off process*) yang cenderung singkat. Hasil analisis Litbang Kompas terhadap rentang waktu uji kelayakan DPR menunjukkan, Adies menjadi waktu paling singkat dalam kalangan calon hakim lainnya.

Uji kelayakan yang dijalani Adies tercatat hanya berlangsung selama 25 menit, jauh lebih singkat dibandingkan dengan calon hakim konstitusi lainnya. Dari data yang ditinjau Litbang Kompas, calon hakim MK yang mengulangi uji kelayakan di DPR rata-rata berlangsung waktu lebih dari 1 jam.

Jika dibandingkan dengan latar belakang yang sama dari politisi, calon hakim Aniel Sani yang sebelumnya dikenal sebagai politisi Partai Persatuan Pembangunan, dalam proses uji kelayakannya memakan waktu 1 jam 45 menit dengan 11 pertanyaan yang diajukan. Sementara Adies mengulangi uji kelayakan selama 25 menit, sebanyak 10 menit di antaranya diploki untuk menjawab pertanyaan. Setelah itu, seluruh fraksi langsung memberikan persetujuan.

Berdasarkan juga dengan uji kelayakan yang dilakukan terhadap Inonisatus Samudra. Hampir seluruh pertanyaan dari anggota DPR menyangkut soal keberpihakan hakim konstitusi yang berasal dari DPR dan posisi kewenangan MK yang dianggap melampaui yurisdiksi. Bahkan, hakim yang dimaksudkan DPR pada saat itu dinilai sering terkena pemarah pihak lain dan "berhaluan" melawan DPR.

Sulit dimandiri, komposisi hakim MK yang sembilan orang dan berasal dari pengantian DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung (masing-masing tiga orang) akan terus berlanjut politik. Namun, pengantian calon hakim MK yang meniadakan dari DPR justru menambah dekritasi citra negatif lembaga ini di mata publik. Apalagi, sebelumnya memori publik masih lekat dengan isu kenakalan tunjangan rumah DPR yang pada akhir Agustus 2025 memicu aksi demonstrasi besar-besaran.

Apakah hal ini berarti DPR kembali bermain-main dengan seoran publik? Tentu publik belum bisa jika nama Adies Kadir menjadi satu-satunya sosok yang memicu aksi demonstrasi di atas, terutama terkait penyalahgunaan tunjangan perumahan anggota DPR.

Dalam pandangan Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Zuhairi Arifin Mochtar, langkah DPR ini tak bisa dianggap sebagai "hakim konstitusi" demi "kepercayaan" yang sesuai kewenangan politik otoritarian. Menurut dia, ini adalah perubahan seoran dan misi dari MK (Agustus 2017/2020).

Kepercayaan DPR
Berdasarkan, penunjukan Adies Kadir merupakan babak kedua. Sebelumnya menjadi calon hakim konstitusi, Adies, yang merupakan Wakil Ketua DPR, sudah melepaskan jabatan maupun ke-

anggota di Partai Golkar. Adies lampirnya diadukan DPR untuk membuka kepercayaan DPR dan prosedur pengambilan yang ditunjukkan DPR.

Ketua Komisi III DPR H. Bambang Soesatyo menilai proses uji kelayakan dan keputusan di DPR, sesuai CDR 2020, merupakan, penunjukan Adies dengan alasan agar MK kembali pada pelaksanaan tugas dan fungsinya yang baik. Hal ini diawali banyak diadukan MK di waktu lalu. "Untuk itu perlu hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif dan rekam jejak yang konsisten di bidang hukum," katanya.

DPR juga meniadakan Inonisatus telah menerima "pengantian" sehingga proses ini perlu digantikan.

Di masa sebelumnya, kasus yang paling mencoreng pada "pengantian" adalah DPR adalah penempatan Hakim Konstitusi Aswanto (pada September 2022). DPR tiba-tiba menambah Aswanto di tengah masa jabatannya yang seharusnya berakhir pada 2024.

Aswanto yang dikemukakan oleh pimpinan Komisi III DPR saat itu, Aswanto dianggap cepat membatalkan undang-undang produk DPR. Tak lama setelah keputusan tersebut, DPR langsung menunjuk Gusman Harahbi (dari Partai Golkar) sebagai penggantinya.

Proses ini dikritik tajam oleh pakar hukum dan aktivis hukum dianggap tidak ada proses. Mereka juga menilai, proses tersebut melanggar Undang-Undang MK yang mengatur pemberhentian hakim hanya bisa dilakukan jika ada pelanggaran berat, penyalahgunaan, atau meninggal.

Jika pada masa Aswanto yang diganti hakim aktif, pada Inonisatus yang diganti calon hakim terpilih yang tinggal selama pelantikan. Kecepatan ini meniadakan pola yang sama, dalam seoran meniadakan oleh DPR tanpa proses yang jelas dan terbuka.

Citra MK
Tak pelak, pengantian calon hakim MK yang serba cepat oleh DPR ini menimbulkan beban bagi lembaga peradilan konstitusi tersebut. Dalam memori publik, MK masih dianggap sebagai lembaga yang mandiri dan keadilan.

Sepanjang 23 tahun perjalanan MK, berbagai sejarah pengadilan konstitusi sudah di alami. Baik itu masa keemasan yang disorot tingkat maupun masa sulit yang dilalui.

Pada masa pemerintahan Jokowi, MK pernah mengalami momen atau tidak bagi negeri ini. Salah satu sejarah MK terbaru adalah putusan tentang larangan bagi aparat kepolisian aktif untuk mendirikan jabatan sipil, putusan Nomor 114/PUU-XVII/2025 itu tentu kabar baik bagi reformasi politik yang menjaditai di posisi sipil.

Hasil survei tatap muka nasional berkala Litbang Kompas dari Juni 2022 hingga Januari 2025 menunjukkan citra MK cenderung bertepatan tetapi semakin baik. Pada Agustus 2023, sebanyak 60,4 persen responden menganggap baik citra MK. Angka ini termasuk paling tinggi dibandingkan survei-survei sebelumnya.

Pertanyaan positif itu kembali muncul pada akhir 2025, bersamaan dengan terbitnya putusan atas perkara uji materi terkait syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Saat itu MK mengeluarkan putusan No 049/PUU-XXI/2025 yang menyatakan usia minimal calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun. Putusan yang dibacakan pada 16 Oktober 2025 itu memicu reaksi negatif dari publik.

Citra MK kini relatif kembali positif dengan keberanian sikapnya yang tetap berperan sebagai penjaga konstitusi yang baik pada aspirasi publik. Pengantian calon hakim MK dari unsur DPR yang serba cepat ini akan kembali menjadi perhatian selanjutnya ujian bagi pamor dan independensi MK ke depan.

GI TOTO SEPTEMIAN/ASLI HILANG/KOMPAS

